

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat sangat berkembang pesat. Ekonomi masyarakat juga meningkat akibat adanya globalisasi. Salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah perkembangan distribusi kendaraan bermotor untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas atau kegiatan sehari – hari. Harga sepeda motor akan sangat sulit dijangkau bagi masyarakat apabila dibayarkan secara tunai.

Bagi masyarakat tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau jika dibeli secara tunai, akan tetapi masyarakat tetap membutuhkan kendaraan tersebut untuk mempercepat dan mempermudah mobilitasnya, terlebih saat ini sedang maraknya inovasi produk kendaraan roda dua, maupun kendaraan roda empat yang menarik minat masyarakat untuk membeli. Untuk mengatasi masalah ini hadir lah lembaga pembiayaan dalam bentuk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk kredit.¹

Untuk memudahkan masyarakat, maka pihak pelaku usaha memanfaatkan permasalahan yang ada dengan menawarkan kepada masyarakat untuk menarik minat pembeli dengan melakukan pembayaran

¹ Abdul R Salman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Redana Media Group, Jakarta, hlm. 100.

kendaraan bermotor menggunakan cara kredit atau mencicil setiap bulan hingga batas waktu tertentu. Adanya kesepakatan antara pelaku bisnis dengan pembeli, akhirnya menyebabkan adanya suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut seperti pihak – pihak yang terlibat yaitu antara kreditur (lembaga pembiayaan) dan debitur (nasabah).

Saat ini, sering kita jumpai bahwa dengan adanya kemudahan yang telah diberikan oleh lembaga pembiayaan, debitur melanggar atau wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Hal ini tentu akan merugikan pihak kreditur sebagai penyedia barang, sehingga tidak jarang kita mendengar penarikan motor yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak yang diberi kuasa dari kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap debitur yang terlambat melakukan pembayaran kredit.

Pada dasarnya, *debt collector* adalah pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan tidak dilarang, asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada karena belum ada aturan mengenai penggunaan *debt collector* dalam lembaga pembiayaan. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Lembaga pembiayaan pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang menyertakan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman).² Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.³

Berdasarkan pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Kedudukan kreditur dalam jaminan fidusia merupakan bukan pemilik objek

² Sitomorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, Grosse, 1993, *Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Pireka Cipta, Jakarta, hlm. 23

³ Herman Darmawi . , 2006, *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta hlm.200

jaminan dikarenakan objek jaminan merupakan milik debitur. Untuk membuktikan jika objek perjanjian fidusia merupakan hak milik debitur, dapat dibuktikan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dimiliki oleh debitur atau dengan menggunakan kwitansi pembayaran.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 “ Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”

Dari uraian berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian atas dasar rasa percaya dan lembaga pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia.

“Dilihat maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (Leasing), apabila terdapat debiturnya yang menunggak pembayaran kredit sampai beberapa bulan, terkadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *Debt Collector*.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.⁴

Pada faktanya, apabila debitur (penerima kredit) mengalami wanprestasi dalam perjanjian fidusia yang dilakukan antara debitur dan kreditur, kreditur terkadang meminta *debt collector* untuk melakukan eksekusi terhadap barang milik debitur.

TEMPO.CO, Kediri - Kepolisian Resor Kediri Kota, Kediri, Jawa Timur akan men-*sweeping* para penagih utang (*debt collector*) yang menarik kendaraan *leasing* di jalanan. Perbuatan mereka dinilai polisi tidak memiliki dasar hukum dan membahayakan masyarakat. Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Kediri Ajun Komisaris Siswandi mengatakan, aksi koboi para penarik kendaraan yang bekerja untuk lembaga pembiayaan ini mulai menuai pro dan kontra. Awalnya mereka membantu mengurus penarikan pembayaran kredit secara prosedural, namun mereka kini lebih mirip pelaku kejahatan yang merampas kendaraan. “Sudah ada beberapa korban yang melapor ke

⁴ Kaisar M.B.Tawalujan, *Tinjauan Atas Eksekusi Fidusia yang Dilakukan di Bawah Tangan*, www.ejournal.unsrat.ac.id, diakses pada tanggal 12 November 2018

polisi,” kata Siswandi kepada *Tempo*, kemarin. Mereka kebanyakan menjadi korban perampasan kendaraan di jalan raya oleh para *debt collector*. Alasan perampasan adalah mereka menunggak angsuran. Tak jarang, beberapa *debt collector* ini melakukan tindak kekerasan dan intimidasi.⁵

Dari penjelasan kasus diatas, diketahui bahwa eksekusi kendaraan bermotor sangat meresahkan masyarakat yang kebanyakan menjadi nasabah / debitur dari perusahaan pendanaan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa perjanjian antara nasabah kredit bermotor dan pihak pembiayaan (leasing) yang merupakan perjanjian fidusia, sebenarnya adalah perjanjian fidusia dibawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial dikarenakan perjanjian fidusia yang dilakukan antara nasabah kredit dan leasing tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan

⁵ Tempo.co, *Polisi Kediri Sweeping Penagih Hutang Jalanan*, <https://nasional.tempo.co/>, diakses pada tanggal 12 April 2019

hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur.⁶

Banyak kita ketahui, lembaga pembiayaan banyak melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.⁷

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

⁶ M. Yahya, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 77

⁷ Fuady Munir, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

Pada Pasal 368 KUHP yang telah dijelaskan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan perbuatan melawan hukum. Dapat kita ketahui juga bahwa diadalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010/2012 “ Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERAMPASAN MOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (PENAGIH HUTANG) DARI NASABAH YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hak milik kendaraan bermotor atas perjanjian antara lembaga pembiayaan dan nasabah ?
2. Apakah tindakan eksekusi jaminan terhadap debitur yang terlambat membayar kredit merupakan perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah perbuatan mengambil yang dilakukan oleh debt collector dapat dikategorikan sebagai perampasan berdasarkan KUHP
2. . Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum perbuatan debt collector yang merampas motor nasabah secara paksa berdasarkan rasa keadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya, terlebih lagi bagi pengembangan teori hukum pidana kedalam kasus-kasus perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *debt collector*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran yang dapat disumbangkan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perampasan motor yang dilakukan oleh *debt collector*, dan lembaga pembiayaan agar tetap menjalankan usaha berdasarkan hukum yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Pidana sehingga dapat menjadi penambah literature – literature yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni melihat hukum sebagai norma didalam masyarakat.

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakana didalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer. Data primer adalah data riil yang didapat dari penelitian di lapangan dengan menggunakan cara berkomunikasi dengan masyarakat di lokasi tempat penelitian di lakukan. Termasuk didalamnya berupa peraturan perundang –undangan, putusan hakim, buku – buku atau dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan – hukum sekunder adalah data – data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian milik orang lain yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dll yang terkait dengan permasalahan – permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, penulis juga menggunakan bahan – bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjukkan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier memiliki contoh seperti ensiklopedia, kamus, website, atau sumber sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

Di dalam penulisan ini, untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode penelitian data melalui studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian pada sumber bacaan seperti buku, peraturan – perundang – undangan terka

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan dalam penulisan hukum yang normatif adalah analisa isi (*content analysis*), analisa perbandingan (*comparative analysis*), analisa kesesuaian dan atau analisa keselaras

G. Rencana Penulisan

1. Rencana Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum

Berisi tentang teori –teori hukum dari permasalahan hukum yang dibahas oleh penulis

BAB III Pembahasan.

Bab ini berisi tentang pembahasan dan penjabaran atau penyajian data – data dari penelitian dari permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini, melalui pengkajian dengan menggunakan teori – teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV. Penutup

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi tentang permasalahan yang diteliti.

